

SKRIPSI

MUSLIM WAHYUDI

**UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Hj. MOERDIATI, S.H., MS.

NIP. 130287031

Penyusun



MUSLIM WAHYUDI

NIM. 039614457

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji
Pada tanggal : 29 Januari 2001**

Panitia penguji skripsi


Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Anggota : 1. Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.



2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti tidak mampu membendung terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia misalnya pada kasus Bogasari Flour Mills, BPPC, Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), CRMI (Cold Rolling Mill Indonesia), dan kasus Chandra Asri Petrochemical Center (CACP).

Terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat merugikan konsumen karena hilangnya hak konsumen untuk memilih, dan mendapatkan barang dan atau yang berkualitas dengan harga yang murah, murah dan berkualitas. Sehingga diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu upaya untuk melindungi konsumen.

- b. Upaya perlindungan konsumen dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat saya bagi menjadi:
 1. Dengan pengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu dalam Bab II, IV, dan V yang terdiri dari pasal 4 sampai dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan

pengaturan yang lebih lengkap tersebut yang semula tindakan tidak terjangkau hukum dengan adanya Undang-undang ini merupakan larangan.

2. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3. Batasan waktu pemeriksaan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga pemeriksaan menjadi lebih singkat.
4. Pemberian sanksi yang berat sehingga pelaku usaha akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran.

2. Saran

- a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kedudukan sangat menentukan karena terlaksananya Undang-undang ini sangat tergantung kepada Komisi Pengawas ini. Sehingga sangat diharapkan diisi oleh orang-orang yang kapabilitas dan kredibilitasnya tidak diragukan dengan cara calon-calonnya disaring atau dipilih secara terbuka.
- b. Walaupun undang-undang ini juga mempunyai kekurangan tetapi seharusnya kekurangan itu tidak menjadi halangan untuk terlaksananya karena juga tidak harus menjadi sempurna untuk dapat dilaksanakan. Karena kekurangan-kekurangan itu dapat diperbaiki selanjutnya dengan melakukan amandemen, dan atau yurisprudensi pengadilan, dan atau dengan penyusunan pedoman yang berkait dengan Undang-undang ini oleh Komisi Pengawas.